

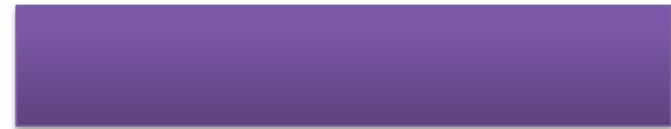


PAPARAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Disampaikan Dalam RAKORDAL Triwulan II
Kabupaten Kotawaringin Barat
Rabu, 18 Juli 2018

Tupoksi Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya adalah penanganan perpajakan daerah dan koordinasi serta kompilasi (laporan) penerimaan PAD berupa retribusi daerah yang ditangani oleh Dinas/Badan teknis (25 SKPD)



REALISASI PAJAK DAERAH

Per 30 Juni 2018

NO.	URAIAN	JUMLAH		%
		TARGET	REALISASI	
	PAJAK DAERAH	57.180.000.000	30.456.516.024	53,26
1	Pajak Hotel	4.000.000.000	211.690.468	5,29
2	Pajak Restoran	3.000.000.000	1.378.350.363	45,94
3	Pajak Hiburan	750.000.000	128.754.138	17,16
4	Pajak Reklame	2.000.000.000	387.513.304	19,37
5	Pajak Penerangan Jalan	17.000.000.000	8.612.429.275	50,66
6	Pajak Parkir	240.000.000	22.307.000	9,29
7	Pajak Air Tanah	40.000.000	6.609.070	16,52
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000	54.440.000	1,08
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.150.000.000	1.860.540.369	22,82
10	Pajak Bumi dan Bangunan	9.000.000.000	1.984.138.493	22,04
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.000.000.000	15.809.743.543	197,62

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	185.457.434.000	87.878.606.421	47,38
4.1.1	PAJAK DAERAH	57.180.000.000	30.456.516.024	53,26
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	18.452.318.000	5.022.007.485	27,21
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.309.174.000	8.748.913.237	93,98
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	100.515.942.000	43.651.169.675	43,43

KENDALA DAN PERMASALAHAN TERKAIT PENDAPATAN ASLI DAERAH

1. Kendala pada dasarnya berkaitan dengan kondisi-kondisi yang belum sepenuhnya mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, misalnya basis data yang terus menerus dalam proses pemutakhiran dan validasi, kecepatan proses penyelesaian Perda-Perda yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan PAD relatif belum secepat keinginan daerah serta kondisi perilaku wajib pajak yang perlu terus menerus dibangun untuk menjadi masyarakat taat bayar pajak.
2. Dukungan para pihak terutama asosiasi-asosiasi seperti Hotel, restoran, walet, dll yang terus menerus perlu dioptimalkan.

SEKIAN & TERIMA KASIH